

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP PROSES
PERCERAIAN PADA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI
KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, NIM. 1814101121

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses penyelesaian perceraian terhadap perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta untuk (2) mengetahui implementasi peraturan nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan (2) dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam teknik penentuan sampel, penelitian ni menggunakan teknik *purposive sampling* dengan teknik pengolahan data secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat dapat dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, (2) implementasi peraturan nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terlaksana cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala terkait proses pelaksanaan perceraian yang dianggap sulit dalam menghadirkan pihak-pihak terkait, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan proses perceraian pada perkawinan tidak tercatat ke masing-masing desa yang bersangkutan. Selain itu diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya lebih memperhatikan lagi sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dan memiliki akta nikah untuk mempermudah segala jenis urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Kata kunci : Implementasi, Perceraian, Disdukcapil

**IMPLEMENTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 96 OF
2018 CONCERNING REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR
POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION OF
UNREGISTERED MARRIAGES IN BULELENG DISTRICT**

By:

Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, NIM. 1814101121

Law Department

Abstract

This study aims to (1) find out the divorce settlement process for unregistered marriages at the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency and (2) find out the implementation of regulation number 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration of the divorce process in marriages not registered in Buleleng. The type of research used is empirical juridical with (2) two types of approaches, namely the legislation approach and the case approach. This research is located at the Department of Population and Civil Registration, which is located at Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja, Buleleng Regency. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials through data collection techniques by means of observation, interviews and documentation studies. In the technique of determining the sample, this research uses a purposive sampling technique with qualitative analysis of data processing techniques. The results show that (1) the divorce process in unregistered marriages can be carried out at the Population and Civil Registration Service by filling out a Statement of Absolute Responsibility signed by both parties, (2) implementing regulation number 96 of 2018 concerning requirements and procedures. The method of population registration and civil registration of the divorce process in marriages not registered at the Population and Civil Registration Office of Buleleng Regency has been carried out quite well, but there are still several obstacles related to the divorce implementation process which is considered difficult in presenting the relevant parties, so the Population and Registration Office Civilians submit the divorce process for unregistered marriages to the respective villages. In addition, it is hoped that the Department of Population and Civil Registration should pay more attention to the socialization of Law Number 1 of 1974 article 2 paragraph (2) to the public about the importance of registering marriages and having a marriage certificate to facilitate all types of affairs related to population administration.

Keywords: Implementation, Divorce, Disdukcapil